

ABSTRAK

Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha yang mengatur syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan kerja. Salah satu bentuk perjanjian kerja yang dikenal dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dalam praktiknya penggunaan PKWT oleh perusahaan menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Penerapan sistem kerja tersebut kerap dinilai lebih menguntungkan bagi pengusaha dan berpotensi mengabaikan pemenuhan hak-hak normatif pekerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker) Provinsi Jawa Tengah dalam menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak-hak pekerja terkait pelanggaran batas waktu PKWT.

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis empiris dengan metode analisis kualitatif. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk mengkaji perilaku hukum yang berkembang dalam masyarakat dengan menelaah keterkaitan antara norma hukum yang berlaku dan relitas penerapannya di lapangan. Data penelitian diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum dan literatur yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap pengaturan PKWT dalam Undang-Undang Cipta Kerja khususnya dalam aspek pengawasan terhadap perusahaan yang mempekerjakan pekerja PKWT melebihi jangka waktu maksimal yang ditetapkan. Lemahnya pengawasan tersebut berdampak pada banyaknya kasus pelanggaran ketenagakerjaan terutama yang berkaitan dengan PKWT. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kinerja pengawasan Dinas Ketenagakerjaan, perbaikan pengaturan mengenai hak dan kewajiban pengawas ketenagakerjaan serta penegasan sanksi hukum bagi perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum yang seimbang serta menjamin pemenuhan hak dan kewajiban pekerja PKWT secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata Kunci: Kepastian Hukum, Hak Pekerja, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

ABSTRACT

An employment contract is an agreement between a worker or laborer and an employer that stipulates the terms of employment, as well as the employment relationship. One form of employment contract recognized in the Indonesian employment system is the Fixed-Term Employment Agreement (PKWT). In practice, the use of PKWTs by companies has shown an increasing trend. The implementation of this work system is often considered more profitable for employers and potentially neglects the fulfillment of workers' normative rights. This study aims to analyze the role of the Central Java Provincial Manpower and Transmigration Office (Disnakertrans) in ensuring legal certainty and protecting workers' rights related to violations of the PKWT term limits.

The study applies an empirical juridical approach with qualitative analysis methods. This empirical juridical approach is used to examine legal behavior developing in society by examining the relationship between applicable legal norms and the reality of their implementation in the field. Research data were obtained from primary and secondary sources. Primary data were collected through interviews and observations, while secondary data were obtained through a library study of relevant legal materials and literature.

The research findings indicate that a comprehensive evaluation of the provisions on fixed-term employment contracts (PKWT) under the Job Creation Law is still needed, particularly regarding the oversight of companies employing PKWT workers beyond the stipulated maximum period. This weak oversight has resulted in an increase in labor violations, particularly those related to PKWT. This study recommends improving the supervisory performance of the Manpower Office, improving regulations regarding the rights and obligations of labor inspectors, and strengthening legal sanctions for companies that fail to comply with the provisions of the Job Creation Law. These efforts are expected to achieve balanced legal protection and ensure the fair fulfillment of the rights and obligations of PKWT workers in accordance with applicable laws and regulations.

Keywords: Legal Certainty, Worker Rights, Fixed Term Employment Agreement (PKWT).